

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA DENPASAR
2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DENPASAR**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KOTA DENPASAR
2017

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA DENPASAR 2017

ISBN: 9786026395214
Nomor Publikasi: 51710.1814
Katalog: 4102004.5171

Ukuran Buku: 17,5 cm X 25 cm
Jumlah Halaman: xvi + 64 halaman

Naskah:
BPS Kota Denpasar

Gambar Kulit:
BPS Kota Denpasar

Diterbitkan Oleh:
© Badan Pusat Statistik Kota Denpasar
Jl. Mulawarman No. 11, Denpasar
Telp. (0361) 418770 Fax. (0361) 434326
E-mail: bps5171@bps.go.id

Dicetak Oleh:
Percetakan Arysta
Jl. Jayagiri XIII No. 29, Denpasar

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

KATA PENGANTAR



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2018 merupakan publikasi yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Denpasar. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan Dinas terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan terbitan yang akan datang. Kami juga mengembangkan diskursus yang berkualitas untuk mengawal pembangunan ekonomi Kota Denpasar. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Denpasar, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Denpasar

I Gede Suarta, SE., M.Agb

DAFTAR ISI

1. KEPENDUDUKAN	1
2. KESEHATAN DAN GIZI	11
3. PENDIDIKAN	21
4. KETENAGAKERJAAN	29
5. TARAF DAN POLA KONSUMSI	37
6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	41
7. KEMISKINAN	51
8. SOSIAL LAINNYA	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Proyeksi Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Denpasar (Ribu Jiwa), 2010-2020	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Denpasar, 2013-2017	5
Tabel 1.3	Proporsi Wanita Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017	8
Tabel 1.4	Persentase Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017	9
Tabel 2.1	Persentase Anak Usia 0-59 bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017	13
Tabel 2.2	Persentase Anak Usia Kurang Dari 2 Tahun Yang Masih Diberi Asi Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017	15
Tabel 2.3	Persentase Persalinan Menurut Penolong Persalinan di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017	16
Tabel 2.4	Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Menurut Lama Keluhan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017	17
Tabel 2.5	Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan dan Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017	19
Tabel 3.1	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017	22
Tabel 3.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017	24

Tabel 3.3	Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017	25
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017	26
Tabel 3.5	Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, Tahun Ajaran 2015/2016-2016/2017	27
Tabel 4.1	TPAK dan TPT Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2014-2017	29
Tabel 4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar (Persen), 2014-2017	31
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2014-2017	32
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2014-2017	33
Tabel 4.5	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2014-2017	35
Tabel 5.1	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Denpasar, 2016-2017	38
Tabel 5.2	Distribusi Pendapatan Kota Denpasar (Persen), 2013-2017	39
Tabel 6.1	Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017	43
Tabel 6.2	Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017	44
Tabel 6.3	Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017	44

Tabel 6.4	Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017	45
Tabel 6.5	Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017	47
Tabel 6.6	Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017	49
Tabel 7.1	Indikator Kemiskinan Denpasar, 2016-2017	52
Tabel 8.1	Persentase Penduduk Yang Bepergian Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017	57
Tabel 8.2	Rumah Tangga Yang Membeli atau Mendapatkan Beras Raskin di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017	59
Tabel 8.3	Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017	60
Tabel 8.4	Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017	61
Tabel 8.5	Rumah Tangga Menurut Jenis Kepemilikan Aset di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017	62
Tabel 8.6	Persentase Penduduk Yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Pertumbuhan Penduduk (Persen), 2013-2017	2
Gambar 1.2	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Denpasar, 2017	3
Gambar 1.3	Sebaran Penduduk Denpasar Menurut Kecamatan (Persen), 2010, 2015, 2020	4
Gambar 1.4	Piramida Penduduk Denpasar, 2017	4
Gambar 1.5	Kepadatan Penduduk Denpasar Menurut Kecamatan (Km), 2010, 2015, 2020	5
Gambar 1.6	Rasio Ketergantungan Denpasar Menurut Kecamatan (Persen), 2010, 2015, 2020	6
Gambar 1.7	Proporsi Penduduk Usia 60+ Tahun di Kota Denpasar (Persen), 2010-2020	7
Gambar 1.8	Usia Perkawinan Pertama Perempuan di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017	8
Gambar 2.1	Angka Harapan Hidup Denpasar dan Bali (Tahun), 2013-2017	12
Gambar 2.2	Persentase Anak Usia 0-59 Bulan Yang Pernah Diimunisasi (Persen), 2016-2017	14
Gambar 2.3	Persentase Anak Usia Kurang Dari Dua Tahun Yang Pernah Diberi Asi (Persen), 2016-2017 ...	15
Gambar 2.4	Tingkat Morbiditas Penduduk Denpasar dan Bali (Persen), 2017	16
Gambar 2.5	Persentase Penduduk Denpasar Yang Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2016-2017	18
Gambar 5.1	Persentase Pengeluaran Per Kapita Denpasar Menurut Jenis Pengeluaran (Persen), 2013-2017	38

Gambar 5.2	Pengeluaran Per Kapita Denpasar Menurut Jenis Pengeluaran (000 Rp), 2013-2017	39
Gambar 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Denpasar, 2013- 2017	52
Gambar 7.2	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kota Denpasar, 2013- 2017	53

<https://denpasarkota.bps.go.id>

MAKLUMAT:

Selain Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2017 juga diterbitkan Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2017

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2017 hanya menampilkan tabel-tabel pokok hasil Susenas 2017

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2017 menyajikan analisis lebih lanjut dari Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar 2017, dilengkapi indikator terkait lainnya dari berbagai sumber

PENDUDUK DENPASAR

2017

Secara rata-rata tiap 1 km² wilayah di Denpasar dihuni oleh **7.155** orang penduduk

Jumlah
914,3
(ribu jiwa)

Kepadatan
7.155
(jiwa per km²)

Perempuan
447,6
(ribu jiwa)

Laki-laki
466,7
(ribu jiwa)

Pertumbuhan
1,89%

Sex Ratio
104%

Dependency Ratio
36,77%

Jumlah penduduk bertambah **1,89%** dari tahun 2016

Setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat **104** penduduk laki-laki

Setiap 100 orang usia produktif menanggung **37** orang usia tidak produktif

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

KEPENDUDUKAN

Sebagai subjek pembangunan, penduduk merupakan modal dasar dalam suatu pembangunan. Dalam hal ini penduduk tidak hanya diposisikan sebagai subjek namun juga sebagai objek pembangunan. Tujuan akhir pembangunan suatu negara adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduknya. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar bagi penyediaan sumber daya manusia (SDM) dalam menentukan gerak langkah pembangunan. Namun tentu saja hal ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas penduduknya, terutama dari sisi kesehatan dan pendidikan.

Sebagai objek pembangunan, seluruh program pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduknya. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari penduduk, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

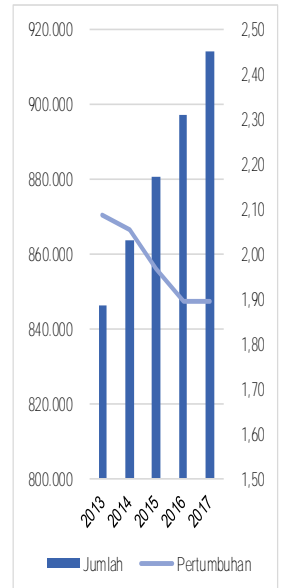
Pembangunan di bidang kependudukan tidaklah mudah. Jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitasnya, penduduk bisa menjadi beban dalam pembangunan. Selain kualitas penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk juga sudah menjadi masalah serius yang menjadi perhatian pemerintah daerah di Bali khususnya Denpasar. Potensi dan permasalahan kependudukan dapat terlihat dari penggambaran karakteristik penduduk baik dari sisi jumlah, laju, komposisi umur, maupun sebaran antar wilayahnya.

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Dari sisi jumlah, penduduk Denpasar cukup banyak dibandingkan jumlah total penduduk Bali. Dengan jumlah penduduk sekitar 914 ribu orang di tahun 2017, angka ini hampir mencapai seperempat jumlah penduduk Bali yang berjumlah sekitar 4,2 juta orang. Kota Denpasar diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Kotamadya pada tanggal 27 Februari 1992 berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992. Dengan demikian Sensus Penduduk yang pertama kali dilaksanakan di Kota Denpasar (setelah lepas dari Kabupaten Badung) adalah Sensus Penduduk tahun 2000. Pada pelaksanaan Sensus Penduduk di tahun 2000, jumlah penduduk Denpasar hanya sebesar 532 ribu jiwa. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah, hingga di tahun 2020 nanti jumlah penduduk Denpasar diproyeksikan hampir mendekati dua kali lipatnya (*doubling population*) dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 963 ribu jiwa.

Denpasar dapat dikatakan memiliki pertumbuhan penduduk paling cepat dibanding daerah lainnya di Bali, laju pertumbuhan penduduk (LPP) pada beberapa tahun terakhir menunjukkan tren berfluktuasi cenderung meningkat. Meskipun Kota Denpasar pertama kali melaksanakan Sensus Penduduk pada tahun 2000, namun jumlah penduduk pada tahun-tahun sebelumnya dapat diketahui dari jumlah penduduk pada kecamatan yang sama di Kabupaten Badung. Laju pertumbuhan penduduk Denpasar pada tahun 1980-1990 sebesar 4,05 persen dan merupakan laju pertumbuhan tertinggi dalam 3 dasa warsa terakhir. Memasuki periode tahun 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk sempat melambat dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun di tahun 2000 mencapai 3,20 persen. Laju pertumbuhan ini terus meningkat hingga pada Sensus Penduduk terakhir di tahun 2010 yang mencapai angka 4,01 persen per tahun.

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk (Jiwa) dan
Pertumbuhan Penduduk
(Persen), 2013-2017



Sumber: BPS Kota Denpasar

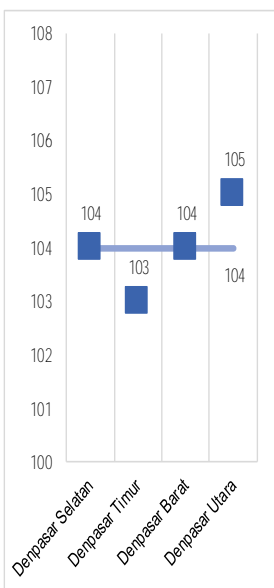
Tabel 1.1. Proyeksi Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Denpasar, 2010-2020 (ribu jiwa)

Kecamatan	2010			2015			2020		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Denpasar Selatan	125.81	120.50	246.31	142.91	136.73	279.64	159.17	152.42	311.59
Denpasar Timur	70.67	68.46	139.13	76.86	74.34	151.20	82.43	79.79	162.22
Denpasar Barat	117.84	112.88	230.72	130.40	124.76	255.16	142.01	136.01	278.02
Denpasar Utara	90.38	86.46	176.84	99.53	95.07	194.60	107.89	103.18	211.07
Jumlah	404.70	388.30	793.00	449.70	430.90	880.60	491.50	471.40	962.90

Sumber: Proyeksi Penduduk Denpasar 2010-2020

Ditinjau dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin/sex ratio (SR) antara penduduk laki-laki dan perempuan di Denpasar relatif berimbang, meskipun jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Pada tahun 2010, 2015, dan proyeksi di tahun 2020, sex ratio penduduk Denpasar berada pada kisaran 104. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Denpasar lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, dengan perbandingan sekitar 100 orang perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Gambar 1.2
Rasio Jenis Kelamin Menurut
Kecamatan di Kota Denpasar,
2017



Sumber: BPS Kota Denpasar

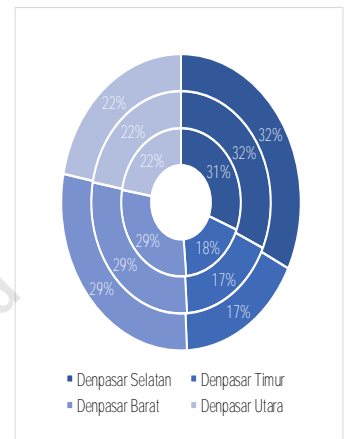
Dominasi jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan terlihat pada seluruh kecamatan yang ada di Denpasar. Pada tahun 2010, 2015, dan proyeksi di tahun 2020, rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Denpasar Timur tercatat yang terendah, dengan sex ratio pada kisaran 103. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Denpasar Selatan dan Denpasar Barat yang memiliki rasio jenis kelamin sebesar 104. Sementara Kecamatan Denpasar Utara memiliki rasio jenis kelamin tertinggi sebesar 105. Hal ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk di masing-masing kecamatan yang ada di Denpasar lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, dengan perbandingan sekitar 103-105 orang laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Selain laju pertumbuhan penduduk, yang juga menjadi fokus dalam pengendalian masalah penduduk adalah sebaran dan kepadatan penduduk. Sebaran penduduk relatif lebih dipengaruhi oleh pola migrasi baik migrasi ke luar maupun migrasi masuk. Pola migrasi ini terkait dengan faktor pendorong dari daerah asal migran dan besarnya tarikan dari daerah tujuan migrasi. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Bali, Denpasar tidak hanya memiliki daya tarik obyek wisata dan atraksi budaya. Perkembangan ekonomi Denpasar khususnya di sektor pariwisata, menciptakan cukup banyak lapangan kerja yang menarik para pencari kerja.

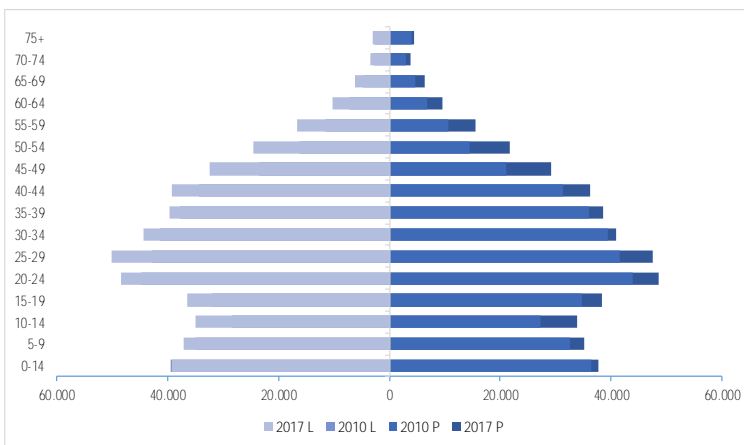
Gambaran piramida penduduk Denpasar dalam kurun waktu 7 tahun terakhir memperlihatkan bagaimana perkembangan penduduk Denpasar lebih dipengaruhi oleh faktor non-alamiah yakni migrasi. Perkembangan piramida penduduk yang cenderung melebar antara tahun 2010 dan 2017, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk pada masing-masing kelompok umur, bukan semata diakibatkan oleh pergeseran antar kelompok umur (kohor), namun akibat penambahan dari penduduk luar di masing-masing kelompok umurnya.

Gambar 1.3
Sebaran Penduduk
Denpasar Menurut
Kecamatan (Persen),
2010, 2015, 2020



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

Gambar 1.4
Piramida Penduduk Denpasar, 2017



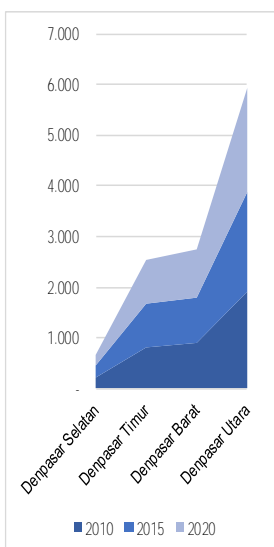
Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa penduduk Bali termasuk Denpasar relatif *immobile*, dalam arti ada keengganan penduduk untuk berpindah dari tempat kelahiran ke tempat lain namun dari sebaran penduduk antar kecamatan terlihat adanya ketimpangan. Sebaran penduduk Denpasar cenderung berada pada Kecamatan Denpasar Barat sebagai pusat Kota Denpasar. Wilayah yang mencakup 19 persen dari total wilayah Denpasar ini dihuni oleh hampir sepertiga penduduk Denpasar (28,93%). Proporsi penduduk di wilayah ini juga terus mengalami peningkatan setiap tahun.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Denpasar, 2013-2017

Uraian	Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Rasio Jenis Kelamin (Persen)
2013	846.20	6 622	104
2014	863.60	6 759	104
2015	880.60	6 891	104
2016	897.30	7 022	104
2017	914.30	7 155	104

Gambar 1.5 Kepadatan Penduduk Denpasar Menurut Kecamatan (Km²), 2010, 2015, 2020



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

Sumber: Proyeksi Penduduk Denpasar 2010-2020

Ketimpangan sebaran penduduk juga dapat dilihat dari kepadatan penduduknya. Denpasar tergolong kota yang sangat padat di Provinsi Bali. Dengan luas yang kurang dari 3 persen dari total luas wilayah Bali, kepadatan penduduk Denpasar di tahun 2017 mencapai 7.155 jiwa per km². Angka ini sangat jauh di atas tingkat kepadatan Provinsi Bali yang hanya sebesar 753 jiwa per km².

Jika dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan yang ada, maka Kecamatan Denpasar Barat merupakan kecamatan paling padat dengan kepadatan penduduk mencapai 10.993 jiwa per km². Angka ini hampir mencapai 1,5 kali lipat kepadatan Kota Denpasar.

Sementara itu, kecamatan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Denpasar Utara. Pada tahun 2017, kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 6.409 jiwa per km².

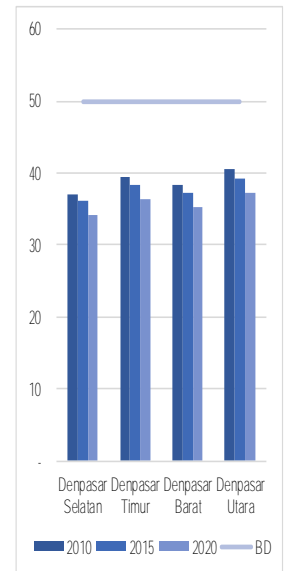
Padatnya penduduk di Kecamatan Denpasar Barat erat kaitannya dengan fungsi sentral dari Kota Denpasar, disamping sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat pendidikan maupun kesehatan. Sementara Kecamatan Denpasar Selatan merupakan wilayah yang dianggap sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*) khususnya pada industri pariwisata. Saat ini pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan terus digenjut untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar.

Angka Beban Ketergantungan

Rasio antara penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif dikenal dengan angka beban ketergantungan atau rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah suatu angka yang menunjukkan besarnya beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Semakin besar penduduk non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, maka semakin besar angka beban ketergantungannya. Secara ekonomi, hal ini juga menggambarkan besarnya beban ekonomi penduduk yang bekerja (produktif) untuk menanggung penduduk yang belum bekerja dan tidak bekerja lagi (non produktif).

Dari perbandingan komposisi antara penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas), penduduk Denpasar tergolong dalam penduduk produktif karena angka rasio ketergantungannya saat ini di bawah 50. Denpasar saat ini dapat dikatakan sudah memasuki masa Bonus Demografi (BD), yang secara harfiah berarti komposisi struktur umur penduduk idealnya mampu memberikan keuntungan secara ekonomi akibat besarnya penduduk yang masuk sebagai

Gambar 1.6
Rasio Ketergantungan
Denpasar Menurut
Kecamatan (Persen),
2010, 2015, 2020



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

angkatan kerja. Untuk bisa berhasil meraih peluang emas yang **dikenal dengan “the windows of opportunity” ini, tentu harus** dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan lapangan kerja yang mampu menampungnya.

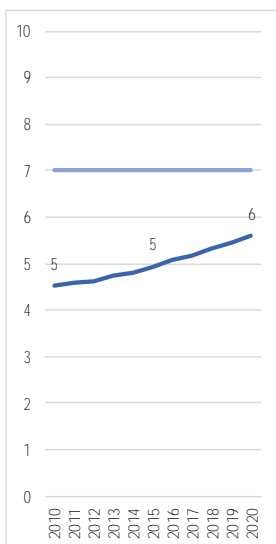
Ageing population merupakan isu kependudukan terkini yang terkait pula dengan komposisi penduduk. Secara natural, manusia atau penduduk akan bergerak menuju masa ini. Ketika komposisi penduduk berusia 60 tahun ke atas semakin banyak, suatu negara atau wilayah dikatakan mengalami *ageing population*. Kondisi ini terjadi akibat rendahnya tingkat fertilitas dan tingkat kematian, serta semakin panjangnya usia harapan hidup penduduk. Pada tahun 2017 ini, populasi penduduk Denpasar bisa dikatakan belum memasuki *ageing population*, meskipun demikian jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas terus meningkat. Hal ini tentu berdampak pada ketersediaan jaminan hari tua, serta berbagai fasilitas pendukung penduduk bagi kelompok lanjut usia ini.

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Tingkat fertilitas tidak terlepas dari usia perkawinan pertama penduduk perempuan. Semakin dini usia perkawinan, semakin panjang rentang masa reproduksi dan semakin besar peluang melahirkan lebih banyak anak. Usia perkawinan pertama juga menjadi indikator kesehatan khususnya bagi perempuan. Perkawinan di usia terlalu muda meningkatkan resiko pada kematian bayi yang dilahirkan. Perkawinan di usia muda memperkecil peluang perempuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Ini terkait dengan kematangan fisik dan mental serta pengetahuan reproduksi bagi perempuan di kala melahirkan dan merawat anak yang dilahirkannya.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, batas usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Batas usia perkawinan perempuan ini sempat menuai kritik dari

Gambar 1.7
Proporsi Penduduk Usia 60
Tahun Ke Atas di Kota
Denpasar (Persen),
2010-2020



Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020

berbagai kalangan. Namun demikian dalam undang-undang perlindungan anak, batas usia minimal perempuan untuk menikah ditingkatkan menjadi 18 tahun. Di sisi lain, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) terus menggalakkan bahwa usia perkawinan ideal perempuan adalah pada saat umur 21 tahun.

Tabel 1.3. Proporsi Wanita Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017

Kelompok Umur	2015	2016	2017
≤ 16 tahun	3.25	5.04	4.47
17-18 tahun	7.70	11.14	12.01
19-20 tahun	15.27	17.02	20.47
21-24 tahun	50.08	35.95	31.06
≥ 25 tahun	23.70	30.86	31.99

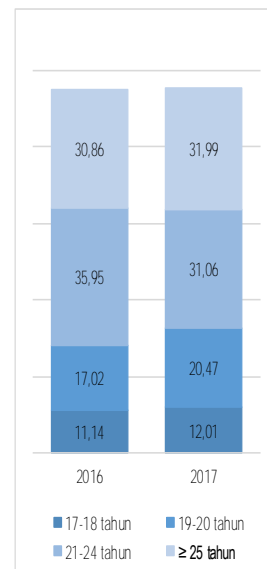
Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Sebagian besar wanita di Denpasar menikah pada umur ideal (19-24 tahun) dengan persentase sebesar 51,53 persen di tahun 2017, menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 52,97 persen. Mengacu ke Undang-undang perkawinan, proporsi wanita pada perkawinan pertama berumur di atas 16 tahun di tahun 2017 hampir mencapai 100 persen, tepatnya 95,53 persen. Namun demikian masih ditemukan 4,47 persen perempuan menikah pada umur yang sangat belia, yaitu antara 10-15 tahun yang mana seharusnya sedang mengenyam pendidikan dasar.

Penggunaan Alat/Cara KB

Penurunan tingkat fertilitas tidak terlepas dari peranan pemerintah melalui program Keluarga Berencana (KB). Melalui program ini, intervensi terhadap faktor pertumbuhan penduduk dilakukan dengan menggalakkan penggunaan alat kontrasepsi atau

Gambar 1.8
Usia Perkawinan Pertama Perempuan Denpasar (Persen), 2016-2017



Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

lebih dikenal dengan alat KB. Dengan berbagai programnya, program KB diharapkan mampu meningkatkan cakupan akseptor KB terutama penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implant, termasuk penggunaan metode kontrasepsi permanen/steril seperti vasektomi dan tubektomi.

Tabel 1.4 Persentase Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara Kontrasepsi di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017

Alat/Cara Kontrasepsi	2015	2016	2017
Sterilisasi Wanita/Tubektomi/MOW	7.15	10.41	11.11
Sterilisasi Pria/Vasektomi/MOP	0.00	0.82	1.81
IUD/AKDR/Spiral	28.35	24.00	30.57
Suntikan	37.96	39.15	32.47
Susuk KB/Implant	3.17	1.67	3.39
Pil	19.15	17.82	16.61
Kondom Pria/Karet KB	2.82	0.82	0.54
Intravag/Kondom Wanita/Diafragma	0.00	0.00	0.00
Metode Menyusui Alami	0.00	1.63	0.68
Pantang Berkala/Kalender	1.41	3.30	2.83
Lainnya	0.00	0.38	0.00

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin dan sedang menggunakan alat kontrasepsi meningkat dari 47,77 persen di tahun 2016 menjadi 48,75 persen di tahun 2017. Hal yang cukup menggembirakan adalah penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang yang masih dominan dan berada di atas 75 persen. Demikian halnya penggunaan metode kontrasepsi permanen, persentase wanita umur 15-49 tahun yang berstatus kawin dan menggunakan metode kontrasepsi ini menunjukkan tren peningkatan. Di tahun 2016 persentasenya hanya sebesar 11,23 persen, kemudian meningkat di tahun 2017 dengan persentase mencapai 12,92 persen.

K E S E H A T A N
T E N A G A
D A N
K E P E R A W A T A N

1.414 Orang
Tenaga Medis

2.536 Tenaga
Keperawatan



405 Tenaga
Kefarmasian



DENPASAR
2017



2.852 Tenaga
Kebidanan

Sumber: Kota Denpasar Dalam Angka

KESEHATAN DAN GIZI

Sumber daya manusia (SDM) yang besar jika tidak dibarengi dengan kualitas yang sepadan justru akan menjadi beban. Salah satu yang dapat menunjukkan kualitas SDM adalah indikator di bidang kesehatan. Presiden RI pada suatu kesempatan menyampaikan bahwa bangsa yang maju, bangsa yang kuat adalah bangsa yang sehat, jadi tanpa kesehatan jangan harap negara akan maju. Tingkat kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan mutu pembangunan suatu wilayah. SDM yang sehat akan mampu secara maksimal mendukung proses dan dinamika pembangunan suatu wilayah, khususnya pembangunan ekonominya.

Oleh karena itu, berbagai program terkait peningkatan kesehatan masyarakat terus digalakkan dan disempurnakan. Porsi anggaran kesehatan baik pada APBD maupun APBN pun mengalami peningkatan. Bahkan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 10 persen dari APBN menjadi salah satu fokus APBN. Anggaran ini nantinya akan diarahkan dalam bentuk peningkatan status kesehatan dan gizi ibu dan anak, pengendalian penyakit, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta peningkatan kualitas dan keberlanjutan pengelolaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Untuk Kota Denpasar, besaran anggaran kesehatan pada APBD (2017) bahkan sudah mencapai 15,13 persen, sesuai dengan amanat undang-undang yang menyatakan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total APBD.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

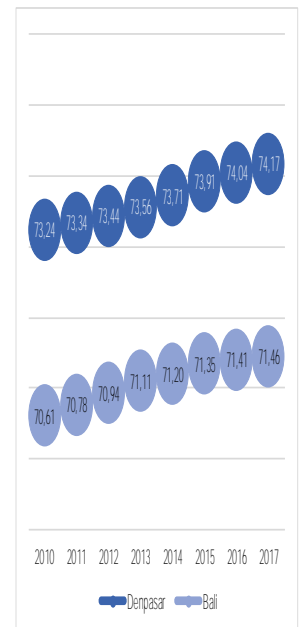
Besarnya porsi anggaran kesehatan jika dimanfaatkan dengan baik tentu akan berdampak pada perbaikan berbagai indikator kesehatan yang ada. Keberhasilan atas berbagai program terkait kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain peningkatan angka harapan hidup (AHH). Berdasarkan komponen pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Indeks Pembangunan Gender (IPG), angka harapan hidup, yang dalam hal ini diukur dari angka harapan hidup saat lahir (E_0) tercatat cenderung meningkat setiap tahun.

Angka harapan hidup Denpasar pada tahun 2010 berada pada 73 tahun (73,24 tahun). Angka harapan hidup Denpasar terus meningkat hingga di tahun 2017 sudah di atas 74 tahun (74,17 tahun). Jika dibandingkan antara penduduk laki-laki dan perempuan, penduduk perempuan memiliki harapan hidup yang lebih lama. Sejak tahun 2010 angka harapan hidup penduduk perempuan Denpasar sudah di atas 75 tahun yaitu 75,16 tahun di tahun 2010, kemudian menjadi 75,98 tahun di tahun 2017. Sementara angka harapan hidup penduduk laki-laki masih di bawah angka 73 tahun yaitu 71,20 tahun di tahun 2010, kemudian menjadi 72,26 tahun di tahun 2017. Dibandingkan dengan kondisi Bali, AHH Denpasar masih lebih tinggi dibanding angka provinsi.

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Tingkat kesehatan penduduk terkait erat dengan tingkat kesehatan balitanya. Selain dari tingkat kematian bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR), tingkat kesehatan balita setidaknya dapat diukur dari tingkat imunitas dan kualitas gizi balita. Tingkat imunitas diukur dari persentase anak usia 0-59 bulan yang pernah diimunisasi menurut jenis imunisasi. Sementara status gizi balita didekati dengan persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah dan atau masih diberi ASI. Indikator yang disampaikan bersumber dari data

Gambar 2.1
Angka Harapan Hidup
Denpasar dan Bali (Tahun),
2010-2016



Sumber: BPS Kota Denpasar

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Imunisasi menjadi salah satu indikator kesehatan mengingat imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh membuat zat anti bodi untuk mencegah terhadap penyakit tertentu. Dengan imunisasi diharapkan tingkat kematian bayi menurun dan meningkatkan peluang hidup (harapan hidup) bagi bayi yang dilahirkan.

Tabel 2.1 Persentase Anak Usia 0-59 bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017

Jenis Imunisasi	2015	2016	2017
BCG	97.56	98.44	96.05
DPT	95.15	92.44	91.57
Polio	96.69	95.60	96.59
Hepatitis B	94.38	95.18	87.31
Campak (MMR)	81.40	81.79	63.69

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Berdasarkan data yang tersedia, sebagian besar bayi telah mendapatkan 5 imunisasi yang diwajibkan pemerintah (imunisasi wajib), antara lain BCG (*Bacille Calmette-Guérin*), DPT (*Diphtheria, Tetanus, Pertussis*), Polio, Hepatitis B, dan Campak (MMR). Terlihat bahwa perbandingan data antara tahun 2016 dan 2017 persentase bayi yang mendapat imunisasi tersebut cenderung menurun. Jika di tahun 2016 persentase anak umur di bawah 5 tahun (0-59 bulan) yang mendapatkan imunisasi wajib di atas 92 persen (kecuali imunisasi Campak hanya 81,79 persen). Kondisi ini menurun di tahun 2017 pada seluruh jenis imunisasi menjadi di atas 87 persen (kecuali imunisasi Campak yang hanya sebesar 63,69 persen).

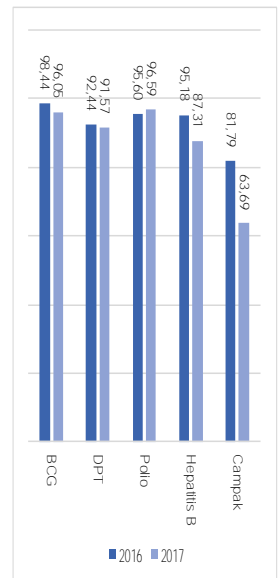
Terlihat bahwa Denpasar masih belum bisa memenuhi target nasional dalam pencapaian imunisasi dasar lengkap (IDL) yang ditetapkan yakni 93 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar balita di Denpasar mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai dengan target nasional. Hal yang cukup menggembirakan adalah di tahun 2017 balita yang mendapat imunisasi Polio sudah mencapai 96,59 persen. Hal ini tidak terlepas dari penyelenggaraan Program Imunisasi Nasional (PIN), selain itu pemerintah pusat juga telah mencanangkan gerakan nasional Indonesia Bebas Polio.

Di sisi lain, pemberian imunisasi Campak dan Hepatitis B tercatat relatif masih rendah. Hal ini terlihat dari persentase imunisasi Hepatitis B yang masih di bawah 90 persen di tahun 2017. Bahkan pada imunisasi Campak (MMR) persentasenya tercatat masih di bawah 70 persen. Padahal imunisasi ini termasuk dalam imunisasi dasar dalam target nasional.

Asupan gizi untuk balita juga menjadi salah satu indikator kesehatan khususnya untuk ibu dan balita. Hal ini dapat diukur dari persentase anak usia 0-23 bulan yang pernah disusui. Berdasarkan data yang tersedia hingga tahun 2017, persentase anak pada umur tersebut yang pernah disusui cenderung menurun. Pada tahun 2016 persentase anak usia kurang dari 2 tahun yang pernah mendapat ASI (air susu ibu) atau disusui sebesar 92,10 persen, kemudian sedikit turun menjadi 91,67 persen pada tahun 2017.

Tidak saja dari sisi pernah atau tidaknya anak disusui, lamanya menyusui juga dapat menjadi indikator kesehatan balita. Pemberian ASI kepada balita menjadi hal yang dianjurkan karena ASI dinilai mampu menyediakan gizi yang lengkap, mudah dicerna dan efisien digunakan, serta dapat melindungi anak dari infeksi. Bagi sang ibu, menyusui juga membantu menunda/menjarangkan kehamilan, melindungi kesehatan ibu, dan dari sisi harga tentu lebih murah dibandingkan dengan susu formula.

Gambar 2.2
Persentase Anak Usia 0-59
Bulan Yang Pernah
Diimunisasi (Persen),
2016-2017



Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Tabel 2.2 Persentase Anak Usia Kurang Dari 2 Tahun Yang Masih Diberi ASI Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017

Jenis Kelamin	2015	2016	2017
Laki-laki	78.45	77.80	68.28
Perempuan	68.78	58.29	67.34
Laki-laki + Perempuan	73.87	67.47	67.83

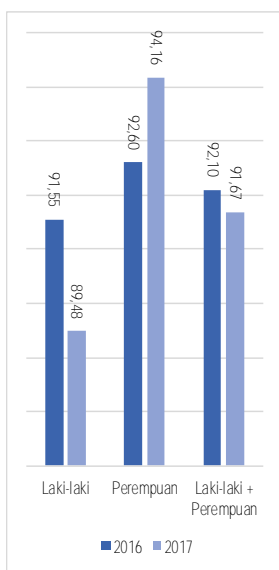
Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Meskipun pemberian ASI eksklusif dilakukan mulai usia bayi 0-6 bulan, namun idealnya pemberian ASI dilakukan hingga anak berusia 2 tahun, yang diimbangi dengan asupan makanan tambahan. Pemberian ASI terhadap bayi hingga berusia 2 tahun ini ditengarai akan memberikan dampak positif pada perkembangan bayi. Kiranya hal ini dapat merefleksikan derajat kesehatan bayi di suatu daerah. Pada tahun 2017 persentase anak usia kurang dari 2 tahun yang masih diberi ASI tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni menjadi sebesar 67,83 persen.

Disamping tingkat imunitas dan gizi balita, penolong pertama dalam proses persalinan menjadi kunci pada rendahnya tingkat kematian ibu pasca melahirkan, serta meningkatkan peluang bayi lahir dengan selamat. Salah satu yang bisa dikatakan sebagai faktor penyebab rendahnya tingkat kematian bayi di Denpasar adalah peningkatan kualitas pada proses persalinan.

Sebagian besar proses persalinan di Denpasar dilakukan oleh tenaga medis. Bahkan sejak tahun 2015, penolong kelahiran oleh tenaga medis sudah mencapai 100. Jika ditinjau secara rinci menurut tenaga medis, pada tahun 2017 persentase penolong kelahiran sebagian besar ditolong oleh dokter kandungan yaitu sebesar 67,68 persen. Angka ini jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 53,74 persen. Penolong kelahiran selanjutnya adalah bidan yang sebesar 31,05 persen. Kemudian disusul oleh tenaga kesehatan lainnya sebesar 1,27 persen.

Gambar 2.3
Persentase Anak Usia Kurang
Dari 2 Tahun Yang Pernah
Diberi ASI (Persen),
2016-2017



Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Tabel 2.3 Persentase Persalinan Menurut Penolong Persalinan di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017

Penolong Persalinan Terakhir	2015	2016	2017
Dokter Kandungan	65.24	53.74	67.68
Dokter Umum	1.77	6.11	0.00
Bidan	31.96	39.69	31.05
Tenaga Kesehatan Lainnya	1.03	0.46	1.27

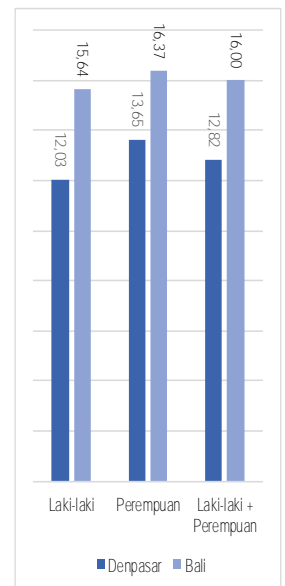
Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan menjadi hal yang wajib dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Apalagi jika melihat tingkat kesakitan penduduk Denpasar yang sudah cukup rendah. Tingkat kesakitan atau morbiditas dihitung dari jumlah penduduk yang mengalami keluhan (sakit) hingga terganggunya aktivitas. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Berdasarkan data Susenas 2017, kurang dari seperlima penduduk Denpasar mengalami keluhan kesehatan. Tingkat morbiditas penduduk Denpasar cenderung mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 tingkat morbiditas penduduk Denpasar sebesar 12,82 persen, menurun jika dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 13,08 persen. Jika dirinci menurut jenis kelamin, tingkat morbiditas penduduk laki-laki cenderung lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Tingkat morbiditas penduduk laki-laki sebesar 12,03 persen di tahun 2017,

Gambar 2.4 Tingkat Morbiditas Penduduk Denpasar dan Bali (Persen), 2017



Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

sementara penduduk perempuan sebesar 13,65 persen.

Lama keluhan kesehatan (sakit) berdampak pada berkurangnya hari produktif bagi penduduk yang mengalaminya, karena lamanya keluhan kesehatan akan berpengaruh pada terganggunya kemampuan penduduk untuk beraktifitas sehari-hari secara normal. Sebagian besar penduduk mengalami keluhan kesehatan selama kurang dari 4 hari. Proporsinya tercatat sebesar 64,35 persen secara keseluruhan. Sementara jika dirinci menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki sebesar 63,31 persen dan penduduk perempuan sebesar 65,32 persen.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Menurut Lama Keluhan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017

Lama Keluhan (Hari)	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
≤ 3	66.97	63.31	60.72	65.32	63.86	64.35
4-7	28.63	26.55	32.23	24.75	30.42	25.61
8-14	3.76	5.35	4.37	5.60	4.06	5.48
15-21	0.00	1.07	1.20	22.23	0.60	1.67
22-30	0.64	3.73	1.48	2.11	1.06	2.89

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Meskipun mengalami keluhan kesehatan nampaknya tidak semua penduduk serta merta berobat pada fasilitas kesehatan maupun tempat berobat lainnya. Hal ini terlihat dari persentase jumlah penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan berobat jalan yang berkisar di bawah 60 persen. Pada tahun 2016 persentasenya mencapai 48,91 persen, kemudian meningkat menjadi 51,15 persen di tahun 2017. Kecenderungan untuk berobat jalan tidak hanya dipengaruhi oleh preferensi penduduk namun juga tidak terlepas dari akses terhadap berbagai fasilitas kesehatan termasuk ketersediaan

jaminan kesehatan yang belakangan makin ditingkatkan seperti JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara) maupun JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Terdapat perbedaan persentase penduduk yang berobat jalan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Persentase penduduk laki-laki yang berobat jalan jauh lebih rendah dibanding perempuan. Persentase penduduk laki-laki yang berobat jalan pada tahun 2017 hanya sebesar 50,09 persen, sementara penduduk perempuan mencapai 52,18 persen.

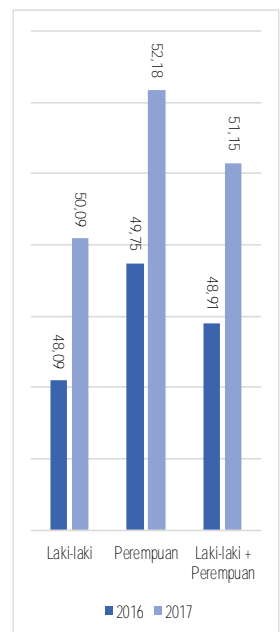
Dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan tetapi tidak berobat jalan sebagian besar alasannya adalah karena mengobati sendiri. Secara keseluruhan poporsinya mencapai 65,03 persen. Sebesar 32,29 persen merasa keluhan kesehatannya tidak perlu berobat jalan. Tidak ada penduduk yang tidak berobat jalan karena alasan tidak memiliki biaya, baik biaya untuk berobat maupun biaya transportasi.

Praktek dokter/bidan menjadi tempat tujuan yang paling umum dari penduduk yang berobat jalan. Di tahun 2017, penduduk yang berobat jalan dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan ini mencapai 57,96 persen. Capaian ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, saat itu fasilitas kesehatan ini hanya dimanfaatkan oleh 50,37 persen penduduk yang berobat jalan. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya praktek dokter/bidan yang memfasilitasi program JKN.

Sebagai fasilitas kesehatan pertama, puskesmas juga menjadi pilihan bagi penduduk yang berobat jalan. Di tahun 2017 persentasenya mencapai 10,91 persen dari penduduk yang berobat jalan. Sementara rumah sakit pemerintah yang menjadi rujukan untuk pelayanan kesehatan lanjutan setelah puskesmas, persentase penduduk yang memilih tempat ini untuk berobat jalan mencapai 10,78 persen.

Meskipun tidak terlalu banyak (kurang dari 5 persen),

Gambar 2.5
Persentase Penduduk
Denpasar Yang Berobat
Jalan Menurut Jenis Kelamin
(Persen), 2016-2017



Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

pengobatan tradisional masih menjadi alternatif pengobatan bagi penduduk Denpasar. Di tahun 2017 persentase penduduk yang berobat jalan dan memilih pengobatan tradisional sebagai tempat berobat sebesar 3,32 persen. Kecenderungan penduduk perempuan untuk memanfaatkan pengobatan tradisional sebagai tempat berobat cenderung lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki.

Tabel 2.5 Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan dan Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017

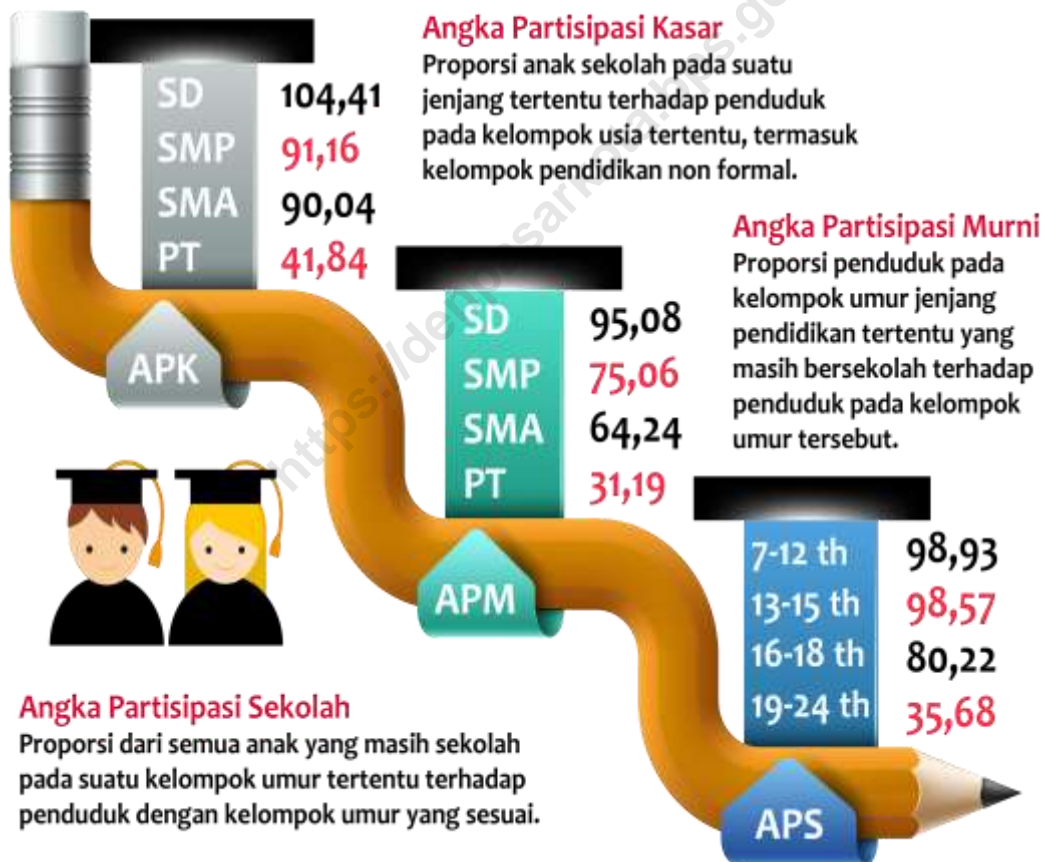
Tempat Berobat	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
RS Pemerintah	8.19	15.76	8.06	6.17	8.13	10.78
RS Swasta	11.22	9.08	12.99	7.20	12.10	8.10
Praktek Dokter/Bidan	50.28	55.89	50.45	59.87	50.37	57.96
Klinik/Praktek Dokter Bersama	17.77	11.46	16.85	13.90	17.31	12.72
Puskesmas/Pustu	10.76	11.16	10.96	10.69	10.86	10.91
UKBM	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00
Praktek Pengobatan Tradisional/Alternatif	0.36	3.40	1.03	3.24	0.69	3.32
Lainnya	0.76	0.34	0.36	0.00	0.56	0.16

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Pilihan tempat berobat antara fasilitas medis dan non medis tidak semata-mata disebabkan oleh faktor preferensi saja, namun juga dari ketersediaan dan penyebaran tenaga medis. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, jumlah puskesmas di Denpasar tahun 2017 sebanyak 11 unit puskesmas dan 25 puskesmas pembantu. Sementara jumlah paramedis masing-masing sebesar 1.414 tenaga medis, 2.536 tenaga keperawatan, 2.853 tenaga kebidanan, dan 405 tenaga kefarmasian. Jumlah dokter yang tersedia di Kota Denpasar terdiri dari 1.267 dokter umum, 275 dokter spesialis, dan 114 dokter gigi.



Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, dan Angka Partisipasi Sekolah Denpasar, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

PENDIDIKAN

Angka Melek Huruf (AMH)

Melek huruf adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Menurut definisi UNESCO, melek huruf adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengomunikasikan, dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH dapat menunjukkan perkembangan intelektual suatu wilayah, selain itu angka melek huruf juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Selama periode waktu lima tahun terakhir, secara umum AMH Denpasar cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2013 AMH Denpasar sebesar 97,95 persen, kemudian sedikit meningkat menjadi 98,70 persen di tahun 2017. Kecenderungan fluktuasi ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Selama rentang waktu lima tahun tersebut, AMH laki-laki berkisar pada angka 99 persen, yaitu dari 99,31 persen menjadi 99,70 persen. Sementara itu, AMH penduduk perempuan juga sedikit berfluktuasi dengan tren yang menunjukkan peningkatan, yaitu dari 96,37 persen menjadi 97,70 persen.

Berdasarkan kelompok umur, AMH pada kelompok umur 65 tahun ke atas, akselerasinya lebih terlihat dibandingkan kelompok umur lainnya. Pada kelompok umur tersebut AMH masih berkisar di bawah 90 persen. Dengan kata lain, persentase penduduk yang belum mampu baca tulis masih cukup banyak. Hal ini kiranya akan

sulit ditingkatkan mengingat penduduk pada kelompok ini tergolong penduduk yang tidak produktif dengan pendidikan yang cenderung rendah. Sementara pada kelompok umur lainnya, sudah tidak terdapat persentase penduduk yang buta huruf, terutama pada kelompok umur 15-24 tahun yang sudah melek huruf 100 persen.

Ketimpangan AMH antara penduduk laki-laki dan perempuan terlihat pada AMH kelompok umur 65 tahun ke atas. Kondisi ini tentu tidak bisa dihindari mengingat pada zaman penduduk kelompok ini mengenyam pendidikan dasar, kondisi dunia pendidikan mungkin jauh berbeda. AMH penduduk laki-laki pada kelompok umur ini tercatat sebesar 97,12 persen, sementara AMH penduduk perempuan hanya mencapai 74,22 persen.

Tabel 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
15 Tahun ke Atas	99.69	99.74	97.62	97.68	98.68	98.73
15-24 Tahun	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
65 Tahun ke Atas	100.00	97.12	80.33	74.22	89.06	84.94

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) adalah banyaknya tahun belajar yang diselesaikan dalam pendidikan formal dan tidak termasuk tahun yang mengulang. Dalam hal ini, usia penduduk yang diukur adalah penduduk yang berumur 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah di Kota Denpasar selama kurun waktu lima tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah mencapai 10,90 tahun. Pada tahun-tahun berikutnya rata-rata ini mengalami peningkatan hingga mencapai 11,15 tahun pada tahun 2017.

Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal yang wajar, mengingat tidak semua penduduk perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan layaknya laki-laki. Dalam hal ini, kemungkinan pada rentang usia tersebut, kaum perempuan harus menikah dan mengurus rumah tangga, sehingga tidak sempat lagi melanjutkan pendidikan. Namun demikian, dari tahun ke tahun rata-rata lama sekolah perempuan tetap mengalami tren peningkatan. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki pada tahun 2017 tercatat sebesar 11,60 tahun, sementara rata-rata lama sekolah penduduk perempuan hanya mencapai 10,82 tahun.

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia dapat dicapai dengan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, meningkatnya tingkat pendidikan penduduk dapat menjadi gambaran meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Tingkat pendidikan dapat dilihat dari ijazah terakhir yang dimiliki. Setengah lebih penduduk berumur 15 tahun ke atas telah berijazah setingkat SMA ke atas. Pada tahun 2017 persentasenya mencapai 60,11 persen. Meskipun demikian, persentase penduduk yang berpendidikan setingkat SD masih cukup tinggi, dengan persentase mencapai 17,71 persen pada tahun 2016 dan 14,74 persen pada tahun 2017. Sementara persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah sudah cukup rendah yaitu hanya sebesar 7,42 persen di tahun 2017.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan penduduk laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk laki-laki yang tidak memiliki ijazah lebih rendah dibanding penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang tidak memiliki ijazah hanya

sebesar 5,04 persen. Demikian halnya jika dilihat lebih jauh menurut jenjang pendidikan. Hanya persentase penduduk perempuan dengan ijazah setingkat SMP yang lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Hal ini kiranya bisa menjadi gambaran bahwa peluang perempuan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi cenderung lebih rendah dibanding laki-laki. Pada tingkat pendidikan Diploma ke atas misalnya, persentase laki-laki yang memiliki ijazah pada tingkat pendidikan ini mencapai 21,16 persen. Sementara persentase untuk perempuan masih kurang dari 20 persen (17,84 persen).

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017

Ijazah Yang Dimiliki	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Tidak Mempunyai Ijazah	2.79	5.04	6.65	9.90	4.68	7.42
SD Sederajat	14.74	13.12	20.82	16.43	17.71	14.74
SMP Sederajat	17.23	16.73	16.78	18.76	17.01	17.72
SMA Sederajat	43.62	43.96	38.06	37.07	40.91	40.58
DI/DII/DIII	6.23	7.42	5.23	5.40	5.74	6.43
Diploma IV/S1/S2/S3	15.39	13.74	12.46	12.44	13.96	13.10

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM), merupakan beberapa indikator pendidikan yang menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari sudut pandang berbeda juga dapat diartikan sebagai kemampuan daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Berdasarkan data tahun 2013 hingga 2017, APS Kota Denpasar untuk penduduk usia 7-12 tahun telah mencapai lebih dari 98 persen, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia tersebut telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Sementara pada kelompok usia lainnya, APS berangsur menurun. Namun secara umum, sebagian besar penduduk usia sekolah sudah dapat menikmati fasilitas pendidikan.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, APS penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Pada jenjang kelompok umur selanjutnya, APS penduduk perempuan tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada kelompok umur 16-18 tahun, APS penduduk perempuan mencapai 86,40 persen, sedangkan APS penduduk laki-laki hanya sebesar 73,83 persen. Begitu juga pada kelompok umur 19-24 tahun, APS penduduk perempuan mencapai 39,05 persen, namun APS penduduk laki-laki hanya sebesar 32,17 persen.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
7-12 tahun	100.00	99.49	96.46	98.29	98.23	98.93
13-15 tahun	97.14	98.66	98.55	98.49	97.85	98.57
16-18 tahun	85.57	73.83	69.48	86.40	78.19	80.22
19-24 tahun	34.41	32.17	29.57	39.05	31.99	35.68

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Jika pada APS tidak memperhatikan jenjang pendidikan sesuai kelompok umur, maka pada APM jenjang pendidikan sesuai kelompok umur digunakan sebagai dasar penghitungan. Dengan cara penghitungan tersebut, maka APM dapat digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan dan juga proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sesuai dengan umurnya.

Sejalan dengan APS, angka APM juga menunjukkan perkembangan yang hampir sama selama lima tahun terakhir. Pada masing-masing jenjang pendidikan, nilai APM menunjukkan tren meningkat pada setiap tahunnya. Selain itu, pola yang sama juga terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, yang memperlihatkan semakin tinggi jenjang pendidikan maka besaran APM semakin rendah juga masih terjadi.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum APM penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan pada hampir seluruh jenjang pendidikan kecuali jenjang SD. Sementara pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, terlihat APM penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada jenjang pendidikan SMP, APM penduduk laki-laki mencapai 81,63 persen, sementara APM penduduk perempuan hanya 69,11 persen. Kemudian pada jenjang pendidikan SMA, APM penduduk laki-laki mencapai 63,82 persen, sedangkan APM penduduk perempuan hanya 64,64 persen.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar (Persen), 2016-2017

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
SD Sederajat	98.19	95.91	95.18	94.14	96.68	95.08
SMP Sederajat	73.30	81.63	76.53	69.11	74.92	75.06
SMA Sederajat	73.32	63.82	52.51	64.64	63.76	64.24

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Kualitas Pelayanan Pendidikan

Untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan, salah satu indikator yang digunakan adalah rasio antara jumlah murid dengan guru. Semakin kecil nilai rasio ini, menandakan bahwa semakin memadainya pelayanan pendidikan dari sisi rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru. Indikator ini juga dapat digunakan

untuk melihat merata atau tidaknya jumlah tenaga pengajar pada suatu daerah.

Rasio murid guru di tingkat SD sederajat pada tahun ajaran 2015/2016 adalah seorang guru rata-rata mengajar sebanyak 21 orang siswa. Rasio ini mengalami penurunan hingga pada tahun ajaran 2016/2017 menjadi sebesar 20 orang siswa. Sebaliknya, pada jenjang pendidikan SMP sederajat rasio murid gurunya mengalami peningkatan selama periode tersebut, dari sebesar 17 orang siswa pada tahun ajaran 2015/2016 menjadi sebesar 18 orang siswa pada tahun ajaran 2016/2017.

Sementara pada jenjang pendidikan SMA sederajat terjadi peningkatan rasio murid guru yang cukup signifikan selama kurun waktu dua tahun terakhir. Rasio murid guru di jenjang ini pada tahun ajaran 2015/2016 berada pada angka 14 orang siswa, lalu pada tahun ajaran berikutnya mengalami peningkatan menjadi sebanyak 20 orang siswa. Kondisi ini mengindikasikan menurunnya kualitas pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA.

Tabel 3.5 Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar, Tahun Ajaran 2014/2015-2016/2017

Tahun Ajaran	Rasio Murid Guru		
	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat
2014/2015	21.20	17.25	14.12
2015/2016	20.63	18.63	12.38
2016/2017	20.63	18.63	20.10

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Denpasar

· Male Vs Female ·

Denpasar, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

KETENAGAKERJAAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tergolong sebagai angkatan kerja, atau dengan kata lain penduduk yang aktif secara ekonomi. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja, namun tidak mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tabel 4.1 TPAK dan TPT Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2014-2017

Jenis Kelamin	TPAK			TPT		
	2014	2015	2017	2014	2015	2017
Laki-laki	81.60	84.43	83.21	2.41	3.08	3.36
Perempuan	62.54	60.46	64.22	2.21	4.21	1.64
Laki-laki + Perempuan	72.26	72.69	73.91	2.32	3.54	2.63

Sumber: Sakernas, BPS Kota Denpasar

TPAK Denpasar selama kurun waktu empat tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2014 TPAK Denpasar sebesar 72,26 persen, yang memiliki arti bahwa sebanyak 72,26 persen dari jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) aktif secara ekonomi atau tersedia untuk kegiatan produksi. Sementara sisanya bukan merupakan angkatan kerja, yang dalam hal ini bisa jadi masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya. Memasuki tahun 2015, TPAK Denpasar meningkat menjadi sebesar

72,69 persen, kemudian pada tahun 2017 TPAK meningkat kembali menjadi sebesar 73,91 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, selama periode tahun 2014 hingga tahun 2017, TPAK laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. TPAK laki-laki selama periode tersebut berada pada kisaran 81-84 persen, sedangkan TPAK penduduk perempuan berada jauh dibawahnya, yaitu berkisar 60-64 persen. Lebih rendahnya TPAK perempuan ini dinilai wajar, mengingat secara umum perempuan bukanlah tumpuan ekonomi keluarga, apalagi setelah menikah kebanyakan perempuan akan mengurus rumah tangga. Namun demikian, jika dilihat tren selama tiga tahun terakhir, TPAK perempuan mengalami peningkatan meskipun masih relatif rendah.

Dari TPAK kita dapat mengetahui gambaran penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Namun untuk melihat seberapa banyak angkatan kerja yang tidak mampu diserap oleh lapangan usaha yang tersedia, dapat dilihat melalui indikator TPT. Angka TPT Denpasar selama kurun waktu tahun 2014-2017 berfluktuasi. TPT Denpasar pada tahun 2014 sebesar 2,32 persen, kemudian naik menjadi 3,54 persen pada tahun 2015. Selanjutnya menurun menjadi sebesar 2,63 persen pada tahun 2017. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT penduduk laki-laki memiliki persentase yang cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT penduduk perempuan. TPT laki-laki selama kurun waktu tiga tahun terakhir berada pada kisaran 2 sampai 3 persen, sedangkan TPT penduduk perempuan berkisar 1 hingga 4 persen.

TPAK dan Tingkat Pendidikan

TPAK yang dirinci menurut pendidikan, dapat memberikan gambaran mengenai penduduk yang aktif secara ekonomi pada masing-masing jenjang pendidikan. Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi

angkatan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi peluangnya untuk terlibat dalam angkatan kerja.

TPAK selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren meningkat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula peluangnya untuk terlibat dalam angkatan kerja. Setidaknya, hal tersebut tergambar dari data selama empat tahun terakhir. TPAK pada jenjang SMA ke atas menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi, berada pada kisaran 74-89 persen. TPAK tertinggi pada kelompok pendidikan tersebut sendiri terjadi pada tingkat pendidikan DIV/Universitas yang mencapai 89,04 persen pada tahun 2017.

Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar (Persen), 2014-2017

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2014	2015	2017
≤ SD	74.07	66.64	68.60
SMP	56.22	53.43	58.75
SMU	69.51	74.73	74.41
SMK	77.92	79.15	76.95
Diploma I/II/III	81.87	86.94	85.57
D IV/Universitas (S1/S2/S3)	88.63	86.72	89.04
Jumlah	72.26	72.69	73.91

Sumber: Sakernas, BPS Kota Denpasar

Di sisi lain, TPAK pada kelompok pendidikan SMP ke bawah relatif lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan lainnya yaitu hanya berkisar di bawah 68 persen. TPAK terendah terjadi pada tingkat pendidikan SMP yang hanya sebesar 58,75 persen. TPAK terendah berikutnya terjadi pada tingkat pendidikan SD ke bawah dengan capaian hanya sebesar 68,60 persen.

Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Dari indikator ini, kita dapat melihat persebaran penyerapan tenaga kerja, selain itu dapat dilihat juga kemampuan daya serap terhadap pada masing-masing lapangan usaha. Lapangan usaha Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi masih menjadi lapangan usaha yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan, serta lapangan usaha Industri.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2014-2017

Lapangan Usaha	2014			2015			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	1.72	0.79	1.33	1.54	0.97	1.31	2.00	0.53	1.37
Pertambangan dan Penggalan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri	11.05	14.84	12.66	9.39	11.96	10.43	11.29	16.18	13.39
Listrik, Gas, dan Air Minum	0.76	0.78	0.77	0.20	0.00	0.12	0.16	0.18	0.17
Konstruksi	12.75	2.58	8.43	12.60	1.30	8.03	9.84	0.84	5.97
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	38.68	47.29	42.33	45.47	49.54	47.11	40.00	45.04	42.17
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	9.31	1.54	6.01	7.78	2.22	5.53	9.84	2.37	6.63
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	5.86	5.51	5.71	6.01	7.37	6.56	7.16	7.21	7.18
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	19.87	26.68	22.76	17.00	26.64	20.90	19.72	27.65	23.13

Sumber: Sakernas, BPS Kota Denpasar

Lapangan usaha Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi mampu menyerap tenaga kerja sebesar 42,17 persen. Sebanyak lebih dari 23 persen tenaga kerja mampu diserap

lapangan usaha Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan. Sementara lapangan usaha Industri menyerap tenaga kerja sebesar 13,39 persen. Lapangan usaha lainnya hanya mampu menyerap tenaga kerja di bawah 10 persen.

Sementara jika ditinjau menurut status pekerjaan, secara umum pilihan masyarakat untuk menjadi buruh/karyawan masih memiliki persentase tertinggi, yaitu sekitar 63-66 persen selama kurun waktu tahun 2014-2017. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu dominan sebagai buruh/karyawan. Pilihan kedua yang terbanyak adalah berusaha sendiri, yang persentasenya berkisar antara 10-14 persen dalam periode empat tahun terakhir.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2014-2017

Status Pekerjaan	2014			2015			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Berusaha Sendiri	14.91	12.95	14.08	9.06	13.67	10.92	11.71	14.98	13.12
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	7.93	6.51	7.33	6.82	7.24	6.99	6.07	7.68	6.76
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Tak Dibayar	9.34	4.28	7.19	8.90	3.94	6.90	7.70	3.16	5.75
Buruh/Karyawan/Pegawai	63.94	62.93	63.51	71.50	63.71	68.35	68.52	62.90	66.10
Pekerja Bebas Di Pertanian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.05
Pekerja Bebas Non Pertanian	1.71	2.10	1.88	1.65	1.43	1.56	2.60	1.36	2.07
Pekerja Keluarga	2.16	11.22	6.01	2.07	10.02	5.29	3.29	9.91	6.14

Sumber: Sakernas, BPS Kota Denpasar

Diantara semua pilihan status pekerjaan tersebut, yang menarik adalah pilihan untuk menjadi pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga. Dibandingkan penduduk laki-laki, kaum

perempuan yang bekerja jauh lebih banyak memiliki status ini. Secara rata-rata jumlahnya mencapai hampir 3 kali lipat pekerja laki-laki. Kemungkinan besar, pilihan ini dipilih karena cenderung lebih fleksibel dan tidak terikat jam kerja sehingga pekerja perempuan jauh lebih banyak yang termasuk pada status ini.

Jumlah Jam Kerja

Berdasarkan jam kerja, penduduk bekerja dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yakni sementara tidak bekerja, setengah pengangguran, dan pekerja penuh. Yang dimaksud sementara tidak bekerja adalah pekerja yang memiliki pekerjaan, namun selama seminggu terakhir sedang tidak bekerja. Sementara yang dikategorikan sebagai setengah pengangguran adalah penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu, namun memiliki jumlah jam kerja kurang dari 35 jam. Kemudian yang dimaksud pekerja penuh adalah penduduk yang bekerja selama seminggu yang lalu dan memiliki jumlah jam kerja 35 jam atau lebih.

Sama seperti kondisi tiga tahun sebelumnya, jumlah pekerja penuh pada tahun 2017 merupakan yang tertinggi hingga mencapai 86,77 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk yang sementara tidak bekerja menjadi yang terendah selama empat tahun terakhir, yaitu hanya sebesar 1,26 persen. Sisanya adalah setengah pengangguran sebesar 11,97 persen.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin, selama kurun waktu empat tahun terakhir, komposisi penduduk laki-laki yang bekerja penuh jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Selama periode tersebut, pekerja penuh penduduk laki-laki jumlahnya berkisar antara 86-91 persen, sedangkan pekerja perempuan hanya berkisar antara 81-86 persen.

Pada setengah pengangguran menurut jenis kelamin, pekerja perempuan jumlahnya jauh mendominasi dibandingkan pekerja laki-laki. Perbedaan yang sangat mencolok terjadi pada

tahun 2014, keberadaan jumlah setengah pengangguran perempuan jumlahnya hampir mencapai 1,5 kali lipat setengah pengangguran laki-laki. Tingginya komposisi setengah pengangguran perempuan ini kemungkinan besar terkait dengan kurang fleksibelnya jam kerja pekerja perempuan, sehingga lebih memilih pekerjaan yang tidak terikat jam kerja.

Tabel 4.5 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2014-2017

Lapangan Usaha	2014			2015			2017		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Sementara Tidak Bekerja	2.77	1.93	2.41	1.39	2.63	1.89	0.47	2.31	1.26
Setengah Pengangguran	10.72	16.31	13.09	7.11	10.69	8.56	10.46	13.97	11.97
Pekerja Penuh	86.51	81.76	84.49	91.49	86.68	89.55	89.06	83.72	86.77

Sumber: Sakernas, BPS Kota Denpasar

RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN DENPASAR



Rp1.474.889 Rp1.538.232 Rp1.560.921 Rp1.966.789

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi adalah susunan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan pola konsumsi disebabkan oleh pendapatan; tingkat pendidikan/pengetahuan; kondisi tempat tinggal; jenis pekerjaan; tingkat peradaban bangsa; kebiasaan dan kondisi sosial budaya masyarakat; tinggi rendahnya harga barang dan jasa; serta selera yang sedang berkembang di masyarakat. Pola konsumsi penduduk merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Dengan menggunakan data pengeluaran dapat diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga meliputi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dalam periode tahun 2013-2017, pengeluaran rumah tangga di Denpasar tidak mengalami pergeseran pola pengeluaran, yaitu pengeluaran bukan makanan masih lebih besar dari pengeluaran makanan. Meskipun pola pengeluaran masih sama, tetapi proporsinya berfluktuasi setiap tahun.

Pada tahun 2017, secara umum tingkat konsumsi yang tergambar dalam konsumsi per kapita penduduk mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi per kapita terjadi baik pada konsumsi makanan maupun bukan makanan. Meskipun sama-sama mengalami peningkatan, namun dilihat dari komposisinya, pengeluaran/konsumsi makanan maupun bukan makanan menunjukkan tren berfluktuasi.

Jika di tahun 2013 komposisi pengeluaran makanan mempunyai porsi sebesar 39,06 persen terhadap total pengeluaran, namun pada tahun 2017 proporsinya hanya mencapai 38,33 persen dari total pengeluaran. Sebaliknya, proporsi pengeluaran bukan makanan terus mengalami peningkatan setiap tahun. Meskipun persentasenya sedikit berfluktuasi, tetapi proporsi pengeluaran bukan makanan cenderung lebih besar dibandingkan pengeluaran makanan selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Denpasar, 2016-2017

Jenis Pengeluaran	Nominal (000 Rp)		Proporsi (Persen)	
	2016	2017	2016	2017
Makanan	592 459	753 894	37.96	38.33
Bukan Makanan	968 462	1 212 895	62.04	61.67
Jumlah	1 560 921	1 966 789	100.00	100.00

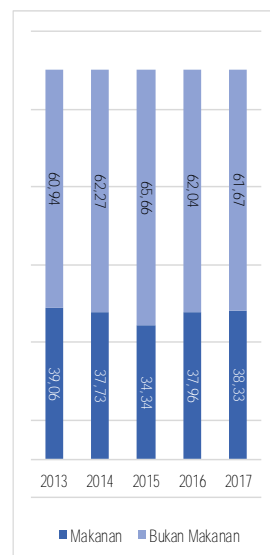
Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Pendapatan Rumah Tangga

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional. Ketimpangan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan 40 persen terbawah terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut:

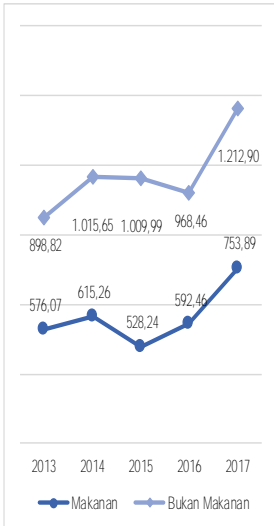
- a. memperoleh <12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
- b. memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan

Gambar 5.1
Persentase Pengeluaran Per Kapita Denpasar Menurut Jenis Pengeluaran (Persen), 2013-2017



Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Gambar 5.2
Pengeluaran Per Kapita
Denpasar Menurut Jenis
Pengeluaran (000 Rp),
2013-2017



Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

- pendapatan dianggap sedang,
c. memperoleh >17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan ulasan ini menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Mengacu pada kriteria Bank Dunia di atas, ketimpangan pendapatan penduduk di Denpasar tahun 2017 dapat dikatakan rendah (*low inequality*). Porsi pengeluaran dari kelompok 40 persen pendapatan terbawah mencapai 19,23 persen. Namun demikian, angka ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan ketimpangan pendapatan. Hal ini terlihat dari distribusi pendapatan yang dinikmati penduduk terbawah yang sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya. Porsi pengeluaran 40 persen kelompok terbawah ini mampu mencapai angka 19,76 persen di tahun 2016.

Tabel 5.2 Distribusi Pendapatan Kota Denpasar, 2013-2017

Distribusi Pendapatan	2013	2014	2015	2016	2017
40 Persen Rendah	13.68	16.13	19.13	19.76	19.23
40 Persen Sedang	37.65	40.47	37.25	38.99	39.29
20 Persen Tinggi	48.67	43.39	43.62	41.25	41.48

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Selain indikator di atas, salah satu indikator lainnya yang sering digunakan untuk melihat ketimpangan antar wilayah yakni *Gini Ratio*. Berdasarkan data sejak tahun 2013, *Gini Ratio* Denpasar cenderung berfluktuasi menurun pada kisaran 0,33 hingga 0,36 yang artinya ketimpangan pendapatan pun cenderung menurun. *Gini Ratio* Denpasar tercatat sebesar 0,36 pada tahun 2013, kemudian menurun menjadi sebesar 0,34 pada tahun 2017.

PERUMAHAN DENPASAR

2017

36,14%
Rumah Milik Sendiri

99,92%
Atap Layak

99,75%
Lantai Bukan Tanah

97,87%
Dinding Permanen

100,0%
Listrik Dari PLN

99,81%
Akses Air Layak

99,35%
Kloset Leher Angsa

Sumber: BPS Kota Denpasar

Home is where
your heart is



PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Perumahan diartikan sebagai sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang dibangun bersamaan sebagai sebuah pengembangan tunggal. Adapun rumah sendiri dapat diartikan sebagai salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan rumah merupakan bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah atau yang dikenal istilahnya dengan papan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan.

Dewasa ini, rumah menjadi salah satu jati diri pemiliknya. Tak hanya menjadi tempat tinggal sesuai fungsinya, rumah dijadikan sebagai *lifestyle*. Denpasar sendiri merupakan daerah dengan harga rumah atau properti yang cukup tinggi. Mengingat wilayah Denpasar cukup kecil dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan kabupaten lain di Bali.

Menurut Depkes RI (2002), rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat, yaitu: pertama, dapat memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan psikologis antara lain *privacy* yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga, dan penghuni rumah. Ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antara penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas *vector* penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan

minuman dari pencemaran. Keempat, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah.

Definisi rumah sehat lainnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 162 dan 163 yang mengamanatkan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada pasal 163 ayat 2 mengamanatkan bahwa lingkungan sehat antara lain mencakup lingkungan permukiman. Salah satu upaya mewujudkan lingkungan sehat dengan peningkatan rumah sehat. Rumah sehat sendiri merupakan rumah yang memenuhi kriteria minimal: akses air minum, akses jamban sehat, lantai, ventilasi, dan pencahayaan (Kepmenkes Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan dan Permenkes Nomor 1077/PER/V/MENKES/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah).

Selain sehat, sebuah rumah juga harus layak huni. Salah satu konsep rumah layak huni yang digunakan adalah konsep dari Kementerian Perumahan Rakyat. Variabel yang dilihat antara lain kualitas dari jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah. (Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota). Dalam publikasi ini akan dibahas mengenai karakteristik rumah berdasarkan kualitas, fasilitas, dan status kepemilikannya.

Kualitas Rumah Tinggal

Kualitas rumah tinggal yang baik akan membuat penghuninya merasa aman, terlindung, dan terjamin kesehatannya. Ada beberapa indikator yang menunjukkan kualitas rumah tinggal yakni rumah dengan lantai bukan tanah, rumah dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes, serta dinding yang terbuat dari

tembok atau kayu.

Salah satu indikator yang menentukan kualitas rumah yang baik adalah dilihat dari lantainya. BPS sendiri mengklasifikasikan lantai menjadi beberapa kategori yakni lantai marmer, keramik, ubin/tegel/teraso, kayu/papan kualitas tinggi, semen/bata merah, bambu, kayu/papan kualitas rendah, dan tanah.

Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017

Jenis Lantai Terluas	2015	2016	2017
Marmer/Granit	1.53	1.78	2.76
Keramik	80.42	81.44	84.97
Parquet/Vinil/Permadani	0.12	0.00	0.20
Ubin/Tegel/Teraso	4.49	3.61	3.17
Kayu/Papan	0.00	0.41	0.13
Semen/Bata Merah	13.09	12.80	8.52
Tanah	0.36	0.23	0.25

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang memiliki rumah dengan lantai tanah tercatat hanya sebesar 0,25 persen. Sedikit lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,23 persen. Terlihat bahwa sebagian besar rumah penduduk Denpasar sudah menggunakan lantai keramik dan semen yakni masing-masing sebesar 84,97 persen dan 8,52 persen. Dari gambaran ini kiranya dapat dikatakan kualitas perumahan dari sisi lantai yang digunakan sudah cukup baik.

Selain lantai, atap rumah pun mempengaruhi kualitas rumah. Atap yang baik memiliki klasifikasi atap yang mampu melindungi rumah dari perubahan cuaca baik panas, hujan, petir, angin, debu, dan sebagainya. Atap yang layak adalah atap yang terbuat dari beton, genteng, sirap, seng dan asbes.

Tabel 6.2 Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017

Jenis Atap Terluas	2015	2016	2017
Beton	2.29	1.80	3.13
Genteng	70.35	71.59	71.97
Asbes	24.56	23.76	22.38
Seng	2.61	2.85	2.45
Bambu/Kayu/Lainnya	0.19	0.00	0.08

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Dilihat dari sisi atap yang digunakan, kondisi perumahan di Denpasar dapat dikatakan telah memenuhi standar layak. Pada tahun 2017, hampir seluruh (97,48 persen) rumah di Denpasar sudah menggunakan atap yang dianggap layak yakni yang terbuat dari beton, genteng, sirap, seng, dan asbes. Kondisi ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 97,15 persen.

Tabel 6.3 Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017

Jenis Dinding Terluas	2015	2016	2017
Tembok	96.72	97.00	97.87
Plesteran Anyaman Bambu	0.19	1.32	0.00
Kayu/Papan	1.16	1.15	1.79
Anyaman Bambu	0.78	0.46	0.33
Bambu/Lainnya	0.93	0.07	0.00

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Dinding rumah merupakan salah satu elemen yang penting pada suatu bangunan rumah. Dinding yang kokoh dapat melindungi penghuninya dari ancaman gempa maupun penyakit. Pada tahun

2017, persentase rumah tangga di Denpasar yang menggunakan dinding tembok pada rumahnya adalah sebesar 97,87 persen. Sisanya masih ber dinding kayu/papan dan anyaman bambu masing-masing sebesar 1,79 persen dan 0,33 persen.

Selanjutnya kualitas rumah juga diukur dari rata-rata luas lantai per kapita. Luas lantai per kapita sendiri dapat diartikan sebagai luas lantai rumah dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga (ART). Luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya.

Dari sisi luas lantai per kapita, sebagian besar rumah tangga memiliki luas lantai per kapita di atas 10m², artinya secara rata-rata setiap anggota rumah tangga mempunyai ruang lebih dari 10m². Dari sisi persentase mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 lalu. Persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita lebih dari 10m² pada tahun 2016 hanya sebesar 60,49 persen. Sementara pada tahun 2017 persentasenya tercatat naik menjadi sebesar 61,17 persen.

Tabel 6.4 Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017

Luas Lantai Per Kapita (M ²)	2015	2016	2017
≤ 7.2	20.54	26.10	24.36
7.3 - 9.9	10.51	13.41	14.47
≥ 10	68.94	60.49	61.17

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Di sisi lain, persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita 7,3-9,9m² meningkat dari 13,41 persen pada tahun 2016 menjadi 14,47 persen pada tahun 2017. Sementara persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 7,2m² angkanya menurun dari 26,10 persen di tahun 2016 menjadi sebesar

24,36 persen di tahun 2017.

Fasilitas Rumah Tinggal

Selain kondisi fisik rumah (atap, lantai, dinding), fasilitas rumah tinggal yang baik sudah tentu akan menambah kenyamanan dan kemudahan dalam beraktivitas serta meningkatkan derajat kesehatan penghuninya. Fasilitas rumah tangga terkait dengan ketersediaan air bersih untuk minum, ketersediaan jamban, dan listrik untuk penerangan rumah tangga.

Indikator pertama yang digunakan untuk melihat fasilitas rumah tinggal yang baik adalah akses rumah tangga terhadap sumber air minum. Air minum bersih didefinisikan sebagai air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangi septik) > 10 m.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum bersih di tahun 2017 adalah sebesar 98,05 persen. Persentase ini sedikit menurun dibandingkan kondisi tahun 2016 yang mencapai 98,57 persen. Berbeda halnya dengan akses terhadap air minum layak. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 99,81 persen pada tahun 2017, naik jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 98,57 persen.

Jarak sumber air minum (sumur atau pompa) dengan pembuangan tinja idealnya di atas 10 meter. Namun hal ini kiranya sulit dipenuhi mengingat kondisi perumahan sekarang semakin sempit dan berdekatan. Hal ini tergambar dari persentase rumah tangga dengan jarak sumber air minum di atas 10 meter dari pembuangan tinja yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang memenuhi kriteria ini mencapai 78,64 persen. Sementara pada tahun 2016 persentasenya turun menjadi hanya sebesar 59,67 persen.

Dari sisi cara memperoleh air minum, sebagian besar rumah tangga memperoleh air minum dengan cara membeli.

Persentasenya mencapai 95,83 persen pada tahun 2017. Hal ini berarti kualitas air minum sudah cukup baik dengan asumsi kualitas air minum yang diperdagangkan lebih baik. Namun pada kondisi tertentu hal tersebut menunjukkan keterbatasan akses bagi penduduk dengan pendapatan rendah. Dalam artian penduduk dengan pendapatan rendah memiliki keterbatasan pendapatan untuk pengeluaran air minum dengan cara membeli.

Tabel 6.5 Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017

Fasilitas Perumahan	2015	2016	2017
Akses Air Bersih	98,42	98,57	98,05
Akses Air Minum Layak	98,42	98,57	99,81
Jarak Sumber Air Minum Dengan Pembuangan Tinja > 10 Meter	71,43	78,64	59,67
Air Minum Dengan Membeli	95,75	94,38	95,83
Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	83,21	84,67	86,88
Jenis Jamban/Kloset Leher Angsa	99,70	99,84	99,35
Pembuangan Akhir Menggunakan Tangki/Spal	98,03	99,72	99,67
Sumber Penerangan Listrik	100,00	100,00	100,00
Bahan Bakar Memasak Menggunakan Listrik/Gas	88,66	87,61	86,27

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Indikator selanjutnya yang bermanfaat untuk mengukur kelayakan sanitasi adalah kepemilikan jamban. Persentase rumah tangga di Denpasar yang sudah memiliki jamban sendiri pada tahun 2017 sebesar 86,88 persen, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2016 yang sebesar 84,67 persen. Jamban yang memenuhi syarat kesehatan merupakan jamban yang pembuangan terakhirnya menggunakan leher angsa/tangki septik. Pada tahun 2017, persentase rumah tangga yang menggunakan jamban dengan leher

angsa sebesar 99,35 persen. Sementara yang pembuangan terakhirnya menggunakan tangki septik sebesar 99,67 persen.

Fasilitas rumah lainnya adalah ada atau tidaknya sumber penerangan di rumah tangga. Secara umum, seluruh rumah tangga di Denpasar menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang teraliri listrik sudah mencapai 100 persen.

Jenis bahan bakar yang sering digunakan untuk memasak kiranya dapat menjadi indikator kualitas dari fasilitas perumahan. Apalagi belakangan ini program alih energi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas gencar dilakukan. Bahan bakar gas dinilai lebih rendah polusi dan lebih hemat energi. Sebagian besar rumah tangga di Denpasar sudah menggunakan bahan bakar listrik/gas untuk keperluan memasak. Pada tahun 2017 persentasenya mencapai 86,27 persen, menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 87,61 persen.

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Status kepemilikan rumah tinggal menjadi salah satu indikator yang perlu dicermati karena dengan indikator ini dapat diperoleh gambaran tentang kemampuan penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia yaitu tersedianya rumah layak huni. BPS sendiri mengklasifikasikan status kepemilikan rumah menjadi beberapa kategori yakni milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dinas, dan lainnya.

Pada tahun 2017, proporsi rumah tangga dengan status rumah milik sendiri di Kota Denpasar hanya sebesar 36,14 persen. Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 41,22 persen. Sebaliknya, rumah tangga yang menempati rumah kontrak atau sewa tercatat meningkat hingga mencapai 56,42 persen pada tahun 2017, setelah sebelumnya hanya sebesar 52,75 persen di tahun 2016.

Penurunan persentase kepemilikan rumah milik sendiri bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya adalah mahalnya harga rumah atau properti yang ada di Denpasar. Harga rumah di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan. Pada kondisi ini menyewa rumah tentu menjadi pilihan alternatif bagi penduduk di wilayah perkotaan.

Tabel 6.6 Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017

Status Kepemilikan Rumah	2015	2016	2017
Milik Sendiri	44.78	41.22	36.14
Kontrak/Sewa	49.27	52.75	56.42
Bebas Sewa	5.27	5.29	5.32
Dinas	0.52	0.74	2.12
Lainnya	0.16	0.00	0.00

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

KEMISKINAN DENPASAR

2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

KEMISKINAN

Perkembangan Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat di wilayah bersangkutan. Namun terkadang pertumbuhan ekonomi yang terjadi kurang dapat terdistribusi dengan merata sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bahkan tetap menyisakan kemiskinan bagi sebagian masyarakat karena kurangnya kemampuan dalam mengakses baik sumber daya dan faktor-faktor produksi yang tersedia, maupun hasil-hasil yang telah dicapai dalam suatu proses pembangunan ekonomi tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kemiskinan yang terjadi, metode yang biasa digunakan adalah metode *Head Count Index*. Menurut metode ini, penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas yang disebut garis kemiskinan. Dengan demikian sebelum menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, maka terlebih dahulu harus dihitung garis kemiskinannya.

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup minimum makanan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) maupun kebutuhan hidup minimum bukan makanan

(perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya). Untuk pengeluaran makanan, nilai rupiah minimum yang dibutuhkan oleh seseorang dapat dikatakan hidup layak atau sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kilokalori per hari (hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978).

Agar seseorang dapat dikatakan hidup layak, pemenuhan akan kebutuhan makanan saja tidak cukup. Oleh karena itu perlu juga dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya. Batas kebutuhan minimum untuk makanan ditambah kebutuhan minimum untuk bukan makanan itulah yang disebut Garis Kemiskinan. Ringkasnya, garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan dan jika pengeluarannya di bawah garis tersebut, maka yang bersangkutan akan dikategorikan miskin.

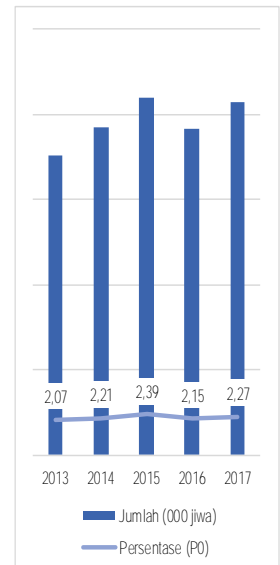
Berdasarkan hasil pendataan Susenas Maret 2017, Garis Kemiskinan (GK) Denpasar mencapai Rp512.947 per kapita per bulan. Kondisi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan Maret 2016 yang sebesar Rp483.821 per kapita per bulan. Sementara itu, kemiskinan Denpasar tercatat sebesar 2,27 persen pada tahun 2017. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,15 persen.

Tabel 7.1 Indikator Kemiskinan Denpasar, 2016-2017

Indikator Kemiskinan	Maret 2016	Maret 2017
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	483 821	512 947
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	19.17	20.70
Persentase Penduduk Miskin (P ₀)	2.15	2.27
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)	0.20	0.40
Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)	0.03	0.12

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Gambar 7.1
Jumlah dan Persentase
Penduduk Miskin Denpasar,
2013-2017



Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Selama kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2017, tren angka kemiskinan Denpasar cenderung berfluktuasi meningkat. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Kota Denpasar adalah sebesar 2,07 persen, sampai dengan tahun 2015 persentase kemiskinan Denpasar bergerak meningkat hingga menyentuh persentase tertinggi yakni sebesar 2,39 persen. Selanjutnya sempat menurun pada tahun 2016 menjadi sebesar 2,15 persen. Kemudian mulai naik kembali pada tahun 2017 mencapai 2,27 persen.

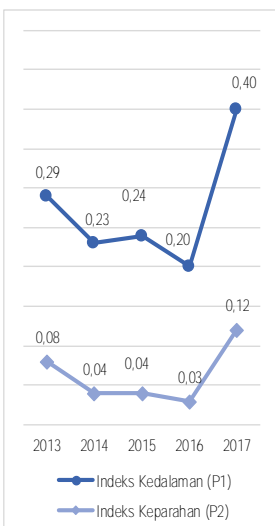
Jika dilihat dari sisi jumlah penduduk miskin, pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin Denpasar tercatat mencapai 20,70 ribu jiwa. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 19,17 ribu jiwa. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya terjadi penurunan kepemilikan jaminan kesehatan penduduk miskin di Kota Denpasar dari 38,01 persen di tahun 2016 menjadi 9,59 persen di tahun 2017. Selain itu juga terjadi peningkatan penduduk yang tidak bekerja di Kota Denpasar dari tidak ada di tahun 2016 menjadi 58,22 persen di tahun 2017.

Indeks kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Selain garis kemiskinan, indeks yang digunakan untuk melihat indikator lain dari kemiskinan yaitu indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman mengandung arti sejauh mana rata-rata pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gaps Index* (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan.

Sementara itu, untuk melihat masalah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin digunakan ukuran Indeks Keparahan Kemiskinan/*Poverty Severity Index* (P_2). Indeks ini secara sederhana merupakan jumlah dari *poverty gap* tertimbang

Gambar 7.2
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Denpasar, 2013-2017



Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

yang penimbangnya sebanding dengan *poverty gap* itu sendiri. Dengan mengkuadratkan *poverty gap*, indeks ini secara implisit memberikan penimbang yang lebih pada unit observasi yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks kedalaman Denpasar sebesar 0,20 pada bulan tahun 2016, nilai tersebut naik menjadi 0,40 pada kondisi tahun 2017. Hal ini mengindikasikan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan (GK). Meningkatnya GK yang diikuti oleh semakin tingginya nilai dari P_1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin berkurang setiap tahunnya yang secara langsung berarti semakin kecil jumlah uang yang dibelanjakan oleh mereka.

Di sisi lain, indeks keparahan Denpasar juga meningkat sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2016, nilai P_2 mencapai 0,03 dan pada tahun 2017 nilainya naik menjadi 0,12. Keadaan ini mencerminkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin juga semakin meningkat. Dengan kata lain sebaran penduduk miskin lebih heterogen dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau ruang lingkup kondisi pengeluaran lebih meluas dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

<https://denpasarkota.bps.go.id>

Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang Denpasar, 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

SOSIAL LAINNYA

Selain tujuh aspek yang menunjukkan kesejahteraan rumah tangga di Denpasar, ada aspek sosial lainnya yang juga mampu menunjukkan hal yang sama, antara lain: intensitas penduduk dalam bepergian, akses terhadap bantuan sosial seperti beras miskin (Raskin) dan kredit usaha; jenis kepemilikan aset di rumah tangga; serta tindak kejahatan.

Intensitas Penduduk Untuk Bepergian

Salah satu aktivitas penduduk yang dicatat dalam Susenas adalah aktivitas bepergian. Yang dimaksud dengan bepergian dalam konsep Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela, dengan waktu kurang dari 6 bulan, baik dilakukan secara perorangan (sendiri) ataupun berkelompok (rombongan), serta bukan bertujuan untuk sekolah atau bekerja secara rutin.

Tabel 8.1 Persentase Penduduk Yang Bepergian Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2015-2017

Jenis Kelamin	2015	2016	2017
Laki-laki	39.56	35.96	57.94
Perempuan	38.27	35.51	55.67
Laki-laki + Perempuan	38.93	35.74	56.83

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Tercatat terjadi peningkatan intensitas penduduk Denpasar dalam melakukan bepergian pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, hanya 35,74 persen penduduk yang bepergian, sedangkan pada tahun 2017 mencapai 56,83

persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, intensitas penduduk laki-laki dalam bepergian lebih besar dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2017, sekitar 57,94 persen penduduk laki-laki bepergian, sedangkan penduduk perempuan hanya 55,67 persen yang bepergian dalam periode yang sama.

Banyaknya penduduk yang melakukan perjalanan wisata (berlibur/rekreasi) sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk. Hal ini karena semakin sejahtera penduduk maka akan lebih banyak yang mampu memenuhi kebutuhan tersier seperti melakukan perjalanan wisata.

Perjalanan wisata merupakan kebutuhan tersier masyarakat yang dapat menunjukkan level kesejahteraan seseorang. Pada umumnya, semakin sejahtera seseorang maka semakin tinggi peluang untuk memenuhi kebutuhan non primer. Wisata atau liburan seringkali dimanfaatkan seseorang untuk mengurangi kejenuhan rutinitas sehari-hari. Dewasa ini perjalanan wisata pun menjadi tren gaya hidup seseorang.

Akses Terhadap Bantuan Sosial

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui diluncurkannya berbagai program-program perlindungan sosial. Terdapat beberapa jenis program perlindungan sosial yang ditujukan untuk rumah tangga miskin antara lain bantuan Beras Miskin (Raskin), kredit usaha, serta Jaminan Sosial lainnya.

Program raskin diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu pangan. Sehingga setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Rumah tangga yang menerima Raskin mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2017 jumlahnya

mencapai 0,61 persen, setelah pada tahun sebelumnya hanya sebesar 0,31 persen.

Tabel 8.2 Rumah Tangga Yang Membeli atau Mendapatkan Beras Raskin di Kota Denpasar, 2015-2017

Jumlah Beras (Kg)	2015	2016	2017
< 15	6.74	0.00	0.00
15-29	12.58	44.63	22.89
30-45	62.79	55.37	0.00
> 45	17.89	0.00	77.11

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Selain Raskin, kredit usaha juga diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya membantu permodalan masyarakat dalam melakukan usaha. Melalui program ini diharapkan dapat membantu usaha/industri rumah tangga untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya. Salah satu program kredit usaha yang sedang digulirkan bagi masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR merupakan program yang termasuk dalam Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil. Klaster ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Dengan bunga yang ringan dan kemudahan dalam memperoleh fasilitas kredit diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membuka atau meningkatkan usahanya.

Sama halnya dengan Raskin, persentase rumah tangga di Kota Denpasar yang menerima kredit usaha mengalami peningkatan pada tahun 2017. Jika pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha hanya sebesar 14,63 persen, namun pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 32,28 persen.

Tabel 8.3 Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017

Jenis Kredit Usaha	2015	2016	2017
PNPM Mandiri	0.34	0.09	N/A
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1.27	3.74	20.89
Bank Umum Selain KUR	3.53	3.65	18.58
Bank Perkreditan Rakyat	N/A	N/A	6.60
Koperasi	6.69	6.04	31.54
Perorangan Dengan Bunga	2.05	1.10	4.83
Pegadaian	N/A	N/A	2.38
Perusahaan Leasing	N/A	0.14	17.78
KUBE/KUB	0.00	0.14	0.40
BUMDes	N/A	N/A	3.19
Lainnya	1.24	1.19	10.72

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Jika dirinci berdasarkan jenis kredit usaha yang diterima rumah tangga pada tahun 2017, mayoritas penduduk Denpasar menerima kredit usaha dari Koperasi hingga mencapai 31,54 persen. Selanjutnya diikuti oleh kredit usaha dari program KUR dan Bank Umum Selain KUR masing-masing sebesar 20,89 persen dan 18,58 persen. Terjadi sedikit perbedaan rincian kuesioner pada Survei Susenas 2017, sehingga terdapat beberapa data yang tidak tersedia pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain kredit usaha, kepemilikan Jaminan Sosial lainnya juga menjadi cerminan dalam kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya jaminan sosial tersebut, diharapkan kondisi masyarakat lebih terjamin jika terjadi sesuatu dalam hidup mereka. Beberapa jaminan sosial yang tersedia diantaranya jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, dan pesangon pemutusan hubungan kerja.

Pada tahun 2017, rumah tangga yang memiliki atau menerima jaminan sosial meningkat pada setiap jenis jaminan sosial dibandingkan tahun sebelumnya. Jaminan sosial yang cukup banyak dimiliki/diterima rumah tangga adalah asuransi kecelakaan kerja sebesar 6,80 persen. Kemudian diikuti oleh jaminan pensiun/veteran, jaminan/asuransi kematian, dan jaminan hari tua masing-masing sebesar 6,41 persen, 5,41 persen, dan 5,39 persen. Sementara rumah tangga yang menerima pesangon PHK hanya sebesar 1,11 persen di tahun 2017.

Tabel 8.4 Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017

Jenis Jaminan Sosial	2015	2016	2017
Jaminan Pensiun/Veteran	5.61	3.29	6.41
Jaminan Hari Tua	2.11	1.91	5.39
Asuransi Kecelakaan Kerja	3.33	2.25	6.80
Jaminan/Asuransi Kematian	2.15	1.02	5.41
Pesangon PHK	0.66	0.77	1.11

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Kepemilikan Aset

Indikator lainnya yang juga dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah kepemilikan aset. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, pada umumnya akan sejalan dengan ragam aset yang dimiliki. Dalam pengumpulan data Susenas, masyarakat ditanyakan terkait kepemilikan aset mulai dari tabung gas 5,5kg atau lebih, lemari es/kulkas, AC, pemanas air, emas/perhiasan (minimal 10gram), sepeda motor, perahu, perahu motor, mobil, serta lahan/tanah.

Mayoritas rumah tangga di Denpasar memiliki sepeda motor sebagai alat transportasi. Hal ini sangat wajar, mengingat sepeda

motor merupakan sarana transportasi utama di Pulau Bali. Pada tahun 2017, sekitar 90,48 persen rumah tangga memiliki sepeda motor, sedikit menurun dibanding tahun 2016 yang mencapai 92,49 persen. Sama halnya dengan sepeda motor, kepemilikan mobil juga menurun di tahun 2017. Jika pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang memiliki mobil mencapai 25,23 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 25,07 persen di tahun 2017.

Tabel 8.5 Rumah Tangga Menurut Jenis Kepemilikan Aset di Kota Denpasar (Persen), 2015-2017

Jenis Kepemilikan Aset	2015	2016	2017
Tabung Gas 5,5 Kg Atau Lebih	38.26	29.80	26.05
Lemari Es/Kulkas	64.76	68.28	65.08
AC	22.04	22.94	25.15
Pemanas Air	6.71	4.89	6.39
Emas/Perhiasan Minimal 10 Gram	37.83	36.55	34.03
Sepeda Motor	93.70	92.49	90.48
Perahu	0.49	0.23	0.31
Perahu Motor	0.14	0.15	0.37
Mobil	23.75	25.23	25.07
Televisi Layar Datar Minimal 30 Inch	N/A	N/A	27.39
Tanah/Lahan	N/A	N/A	39.45

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Kulkas juga menjadi salah satu aset yang tinggi persentase kepemilikannya di Denpasar. Sekitar 65,08 persen rumah tangga di Denpasar sudah memiliki kulkas pada tahun 2017. Jenis aset lainnya yang juga cukup tinggi persentasenya adalah emas/perhiasan dengan berat minimal 10 gram serta tabung gas 5,5 atau lebih. Pada tahun 2017 persentasenya masing-masing sebesar 34,03 persen dan 26,05 persen. Rumah tangga yang memiliki AC

juga cukup banyak di Kota Denpasar hingga mencapai 25,15 persen pada tahun 2017, setelah sebelumnya sebesar 22,94 persen.

Pada Survei Susenas tahun 2017, terjadi penambahan rincian kepemilikan aset yaitu kepemilikan televisi layar datar minimal 30inch dan tanah/lahan. Persentase rumah tangga yang memiliki aset tersebut pada tahun 2017 masing-masing sebesar 27,39 persen dan 39,45 persen. Data pada tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia untuk aset tersebut.

Korban Tindak Kejahatan

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat keamanan di suatu wilayah. Semakin sejahtera suatu wilayah, maka diasumsikan akan semakin rendah tingkat kejahatan yang terjadi. Selama tahun 2017, persentase penduduk Denpasar yang pernah menjadi korban kejahatan adalah sebesar 1,65 persen. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 1,06 persen.

Tabel 8.6 Persentase Penduduk Yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2015-2017

Jenis Kelamin	2015	2016	2017
Laki-laki	1.79	1.50	1.24
Perempuan	1.04	0.61	2.08
Laki-laki + Perempuan	1.43	1.06	1.65

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar

Dirinci menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang menjadi korban kejahatan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2017, sekitar 1,24 persen penduduk laki-laki menjadi korban kejahatan, menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 1,50 persen. Sementara itu penduduk perempuan yang menjadi korban kejahatan meningkat

dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 0,61 persen, kemudian menjadi sebesar 2,08 persen pada tahun 2017.

<https://denpasarkota.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DENPASAR**

Jl. Mulawarman No. 11, Denpasar 80111
Telp. (0361) 418770, Fax (0361) 434328
Email : bps5171@bps.go.id
Homepage : <http://denpasarkota.bps.go.id>

ISBN 978-602-4395-21-4



9 786026 395214